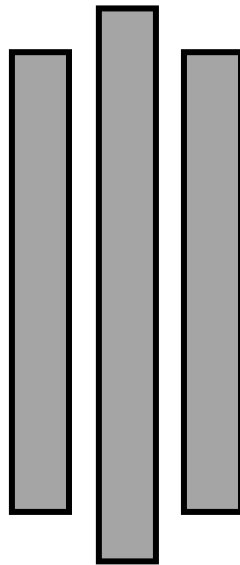




# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS SOSIAL  
KAB. LOMBOK TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2023**

*Jalan Prof.M.Yamin,SH No.57 Selong Komplek Kantor Bupati Lantai IV*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) adalah dokumen rencana kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD satuan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD untuk rencana yang dimaksud. Sedangkan Renja-SKPD Dinas Sosial adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun untuk periode 2023, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023 Dinas Sosial.

Dalam mencapai sasaran program dan arah kebijakan untuk pembangunan, Lombok Timur yang masih dihadapkan problem kemiskinan dan pengangguran berbagai program penanggulangan percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Untuk mencapai sasaran penurunan kemiskinan tersebut, arah kebijakan meliputi memberikan perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin, peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dengan meningkatnya akses pelayanan dasar maka kualitas sumberdaya manusia keluarga miskin dan generasi muda dari keluarga miskin dapat meningkat, dan sehingga berpeluang besar untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokoknya diharuskan memiliki dokumen perencanaan tahunan, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai rujukan pelaksanaan tugas selama tahun 2023.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kab.Lotim Tahun 2023 salah satu perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM RENJA SKPD ADALAH :**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2023), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.
2. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 untuk menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

#### **1.4 SISTEMATIKA RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (DINAS SOSIAL KAB. LOMBOK TIMUR) DISUSUN DENGAN SISTIMATIKA SEBAGAI BERIKUT:**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Rencana Kerja
- 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

##### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 1.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Sosial

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

- 4.1 Program dan Kegiatan

##### **BAB V : PENUTUP**

#### **1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Perbup Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah dan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.

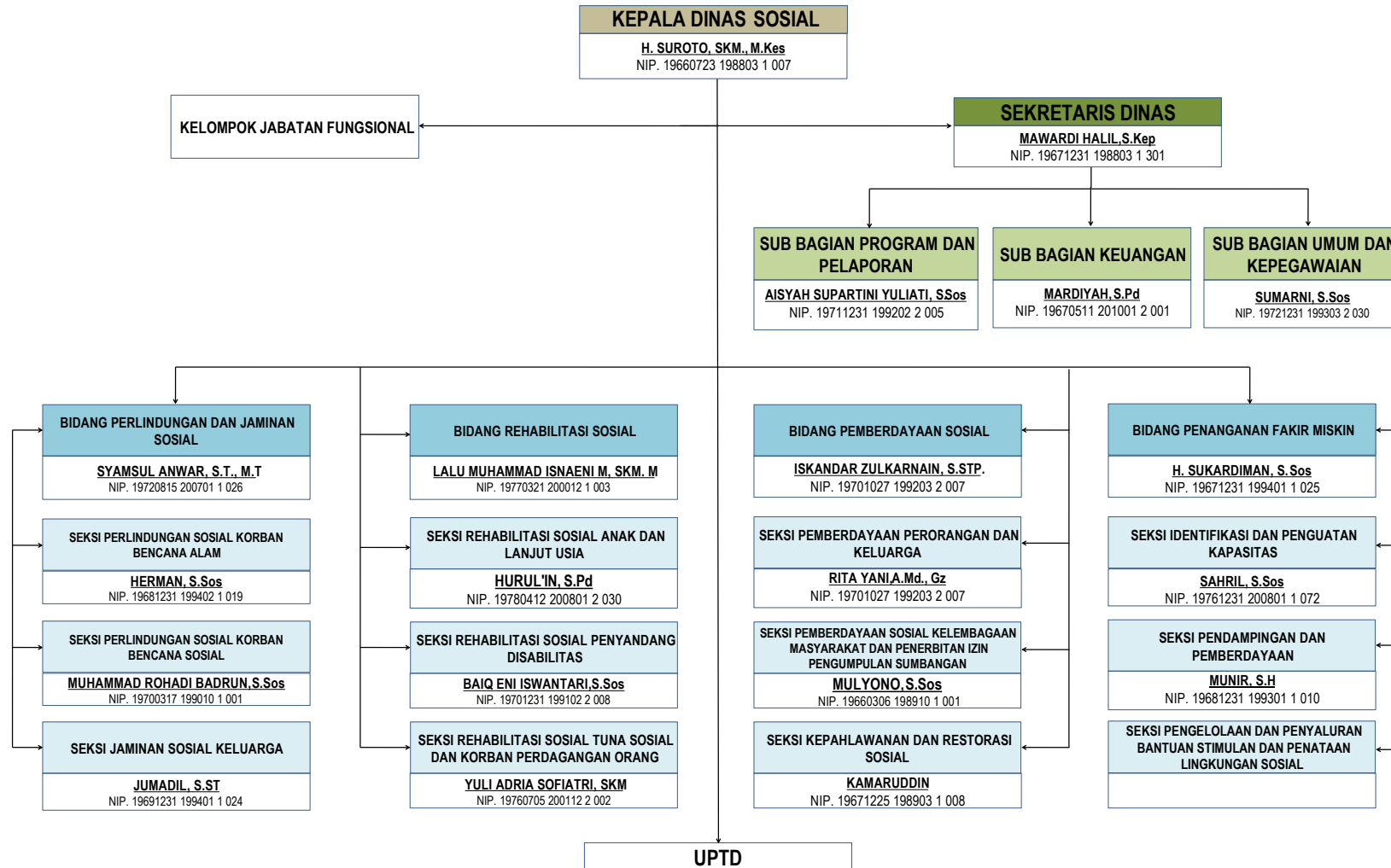
Gambaran organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
  1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Kepala Sub Keuangan;
  3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  3. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Korban NAFZA.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan;
  3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
3. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.



# STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2020)





### 1.5.1 Data Pegawai

**Tabel 1.1**  
**Data pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur**

No.	Golongan	Jumlah	Ket.
<b>A.</b>	<b>Tenaga Administrasi</b>		
1	Golongan IV	5	
2	Golongan III	21	
3	Golongan II	4	
4	Golongan I	-	
	Jumlah	29	
<b>B.</b>	<b>Tenaga Fungsional</b>		
1	Golongan IV	1	
2	Golongan III	12	
	Jumlah	13	

### 1.5.2 Data Peralatan

Data-data peralatan yang ada di Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Peralatan Dinas Sosial**

NO	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. TANAH</b>						
1.	Tanah Bangunan Pasar	2017	6.284.00	M <sup>2</sup>	2.598.264.000	Pasar tradisional dari Bapendda
2.	Tanah untuk makam Pahlawan	1980	9.200.00	M <sup>2</sup>	378.840.000	Pindah SKPP dari STT
	Jumlah				<b>2.977.104.000</b>	
<b>II. PERALATAN DAN MESIN</b>						
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019

6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	9	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	2	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2012	1	buah	19.500.000,00	MUTASI DARI KEC. WANASABA KE DINAS SOSIAL
12	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1/1/2019	4	buah	217.500.000,00	Kepala Dinas
13	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1/1/2007	05/01/1900	buah	100.800.000,00	2019 Mutasi ke Setda kemudian ke BKPSDM dan mutasi lagi ke sosial tahun 2020
14	Truck + Attachment	1/1/2005		buah	166.000.000,00	kendaraan dari Nakertrans/Pemegang Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
15	Sepeda Motor	1/1/1997	6	buah	7.429.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans kendaraan ada di Gudang
16	Sepeda Motor	1/1/2003		-	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang, M.JUNIARDI
17	Sepeda Motor	1/1/2003			10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (AISYAH SUPARTINI YULIANTI)
18	Sepeda Motor	1/1/2006	4	buah	11.300.000,00	Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (SAEPUL) TKSK
19	Sepeda Motor	1/1/2002	2	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan ada di Gudang
20	Sepeda Motor	1/1/2002	1	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (MASKUR HAIDI)
21	Sepeda Motor	1/1/2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Kendaraan ada di Gudang
22	Sepeda Motor	1/1/2001	3	buah	9.800.000,00	Barang dari Hutbun Pemegang (SAHRUDIN,S.Sos)
23	Sepeda Motor	1/1/2008	1	buah	12.500.000,00	Barang dari Hutbun. Pemegang (NANANG SYAHRONI)
24	Sepeda Motor	1/1/2017	2	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (MARDIYAH,SPd)
25	Sepeda Motor	1/1/2017	1	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (SUMARNI,S.Sos)
26	Sepeda Motor	1/1/2011	1	paket	19.496.575,00	KADES DASAN LEKONG
27	Sepeda Motor	1/1/2012	2	set	19.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Aikmel Ke DINSOS 2019

28	Sepeda Motor	1/1/2012	1	paket	19.500.000,00	KENDARAAN DINAS UNTUK KEPALA DESA SAPIT
29	Sepeda Motor	1/1/2003	1	paket	11.500.000,00	MUTASI DISHUB PEMEGANG Drs.EDY SUPRAYITNO
30	Sepeda Motor	1/1/2012			19.500.000,00	Mutasi dari Kec. Wanasaba
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2011	1	set	19.500.000,00	PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 KEPALA DESA/ KE DINAS SOSIAL
32	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	2'	buah	13.727.750,00	KE DINAS SOSIAL
33	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2012			19.650.000,00	KE DINAS SOSIAL
34	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
35	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
37	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
38	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2013	1	buah	13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
39	Lemari Penyimpan	1/1/2013	1	buah	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
40	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	1	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
41	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	14	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
42	Lemari Besi/Metal	1/1/2019			22.169.000,00	lemari besi 7 buah untuk perlengkapan kantor, Tinggi 140 cm Lebar 40 cm
43	Lemari Kayu	1/1/2014	60	buah	3.750.000,00	Barang dari Hutbun
44	Lemari Kayu	1/1/2015	14	buah	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
45	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
46	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
47	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
48	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
49	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Barang dari Hutbun
50	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Baarang dari Hutbun
51	Rak Kayu	1/1/2016			3.500.000,00	Barang dari Hutbun
52	Filing Cabinet Besi	1/1/2015			2.568.000,00	Barang dari Hutbun
53	Filing Cabinet Besi	1/1/2016			2.600.000,00	Barang dari Hutbun
54	Brandkas	1/1/2014			13.107.500,00	Barang dari Hutbun
55	Papan Pengumuman	1/1/2017			3.375.000,00	Pembelian
56	Papan Tulis	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Hutbun
57	Alat Kantor Lainnya	13/10/2020			7.000.000,00	Pengadaan Running Teks
58	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
59	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
60	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.500.000,00	Barang dari Hutbun
61	Kursi Besi/Metal	13/10/2020			1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja

62	Meja Rapat	15/10/2020			30.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat
63	Tempat Tidur Kayu	24/04/2020			36.750.000,00	Pengadaan Tempat Tidur
64	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			6.000.000,00	Barang dari Nakertrans
65	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
66	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			3.960.000,00	Barang dari Nakertrans
67	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			2.860.000,00	Barang i Nakertrans
68	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			1.216.000,00	Barang dari Nakertrans
69	Meja 1/2 Biro	13/10/2020			3.605.000,00	Pengadaan meja 1/2 biro
70	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			13.500.000,00	Pengadaan Kasur
71	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			6.825.000,00	Pajak
72	Kursi Rapat	1/1/2014			2.200.000,00	Barang dari Hutbun
73	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
74	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
75	Kursi Rapat	03/11/2020			11.760.000,00	
76	Kursi Putar	1/1/2016			4.466.500,00	Barang dari Nakertrans
77	Kursi Putar	1/1/2015			1.000.000,00	Barang dari Hutbun
78	Kursi Putar	1/1/2015			3.000.000,00	Barang dari Hutbun
79	Kursi Putar	1/1/2017			3.125.000,00	Pembelian
80	Kursi Lipat	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
81	Kursi Lipat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
82	Meubeler lainnya	13/10/2020			2.105.000,00	Pengadaan Lemari Rias
83	Mesin Pemotong Rumput	1/1/2017			3.890.000,00	Pembelian
84	A.C. Window	1/1/2016			20.000.000,00	Barang dari Hutbun (Pindah)ke Ruang SEKDIS
85	A.C. Split	1/1/2016			19.500.000,00	2019 Mutasi ke Dinas Sosial
86	Kipas Angin	1/1/2016			750.000,00	Barang dari Hutbun
87	Alat Pendingin lainnya	1/1/2017			5.460.000,00	Pembelian
88	Sound System	1/1/2013	1	buah	2.000.000,00	Barang dari Nakertrans
89	Sound System	05/11/2020	1	Buah	17.548.000,00	Pengadaan 1 (satu) unit Sond system Komplit
90	Wireless	1/1/2015	1	buah	8.000.000,00	Barang dari Nakertrans
91	Gordyn/Kray	1/1/2019	1	paket	8.100.000,00	Penghias Ruang/gordyn
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24/04/2020	1	paket	11.400.000,00	Pengadaan 2 Set Meja Makan dan Kursi
93	Alat Rumah Tangga Lain-lain	04/11/2020	1	paket	7.200.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
94	Alat Rumah Tangga Lain-lain	03/11/2020	1	paket	21.835.000,00	
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			16.737.500,00	Perbidang
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			66.950.000,00	
97	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	13/10/2020			7.913.100,00	Pengadaan Meja kursi Tamu 1 (satu) set
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13/10/2020			4.500.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon II
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	03/11/2020			9.280.000,00	
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			48.926.000,00	Kursi Pejabat Eselon IV

101	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1/1/2014	1	buah	1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
102	Buffet Kaca	13/10/2020	1	buah	2.055.000,00	Pengadaan Rak Arsip
103	Telephone Hybrid	1/1/2014	1	buah	1.200.000,00	Barang dari Hutbun
104	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1/1/2017	1	buah	799.400,00	Pembelian
105	Layar Film/Projector	1/1/2019	1	buah	10.806.500,00	Perlengkapan Kantor
106	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1/1/2015	1	buah	1.292.500,00	Barang dari BLHPM
107	Internet	1/1/2013	1	unit	49.000.000,00	Barang dari Hutbun
108	P.C Unit	1/1/2014			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
109	P.C Unit	1/1/2015			5.000.000,00	Barang dari Nakertrans
110	P.C Unit	1/1/2015			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
111	P.C Unit	1/1/2014			10.500.000,00	Barang dari Hutbun
112	P.C Unit	1/1/2015			6.350.000,00	Barang dari BLHPM
113	P.C Unit	1/1/2017			34.000.000,00	Pembelian
114	P.C Unit	1/1/2017			17.985.000,00	Pembelian
115	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian Peruntukan Operator (PKH)
116	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian
117	P.C Unit	1/1/2019			36.742.500,00	pc unit
118	P.C Unit	1/1/2018			25.485.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
119	P.C Unit	1/1/2018			8.490.000,00	Pembelian Peruntukan SUB BAG Keuangan dan Pelaporan
120	P.C Unit	01/04/2020			13.550.000,00	Komputer PC
121	P.C Unit	01/04/2020			8.991.000,00	Pengadaan Komputer PC 2020
122	Lap Top	1/1/2015			7.000.000,00	Barang dari Nakertrans
123	Lap Top	1/1/2017			63.993.600,00	Pembelian
124	Lap Top	1/1/2017			18.500.000,00	Pembelian
125	Lap Top	1/1/2019			8.755.000,00	Lap top / Sekretariat
126	Lap Top	1/1/2019			30.607.500,00	lap top
127	Note Book	1/1/2017	60	buah	89.958.000,00	tablet Pembelian Jumlah 60 Pruntukan (SLRT)
128	Line Printer	1/1/2019			18.878.000,00	Perlengkapan Kantor
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2015			1.500.000,00	Barang dari Nakertrans
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			4.000.000,00	Pembelian
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.466.700,00	Peruntukan Operator PKH
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.290.000,00	Pembelian (Propel)
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			9.129.000,00	Pembelian

138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2019			4.769.500,00	Sekretariat
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/04/2020			8.800.000,00	Pengadaan Printer 2020
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	Pengadaan Printer 2020
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	pegadaan Printer 2020
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16/11/2020			1.699.000,00	Pengadaan Printer
143	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2017	1	unit	2.750.000,00	Pembelian
144	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
145	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
146	Air Conditioning (AC)	1/1/2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
147	Air Conditioning (AC)	03/11/2020			38.110.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruang/AC
	Jumlah				<b>2.149.745.004,00</b>	

### III. GEDUNG DAN BANGUNAN

1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			79.616.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			452.364,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			4.523.636,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.618.182,00	
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.261.818,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			18.094.545,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			1.809.454,00	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			1.809.454,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			18.094.546,00	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.495.000,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.455.000,00	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			35.000.000,00	sekat ruangan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			187.500.000,00	Penambahan Gedung Kantor
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			56.990.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Trauma Centre (RPTC)/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			179.780.000,00	gapura makam pahlawan ( hujat )
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			9.800.000,00	Biaya Pendukung Untuk Penataan Makam Pahlawan
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	04-Mei-20			2.500.000,00	Biaya Pendukung untuk pekerjaan Sekat Ruang Gedung Kantor

19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			6.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (RPTC)
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			7.800.000,00	Biaya Pendukung pada Keg. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (Penataan Makam Pahlawan)
22	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			8.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RPTC)
23	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	31-Jan-11			352.978.850,00	Bangunan Gor selaparang Mutasi dari dikbud
24	Tugu Kemerdekaan				43.214.250,00	PINDAH SKPD DARI STT
<b>Jumlah</b>					<b>1.193.703.099,00</b>	
<b>IV. JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>						
1	Jalan Khusus Lainnya	31-Des-11			72.700.000,00	Pindahan SKPD dari Hutbun
2	PLTN Lain-lain	01-Jan-14			10.000.000,00	Pindah SKPD dari STT (Instalasi Listrik TMP)
<b>Jumlah</b>					<b>82.700.000,00</b>	
<b>V. ASSET TETAP LAINNYA</b>						
1	Peta Citra Sport	2008			11.000.000,00	Pindah SKPD dari Hutbun
2	Alat Kesenian Lain-lain	2014			7.525.000,00	Pindah SKPD dari STT
3	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			9.360.000,00	Piala
4	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			15.040.000,00	Pindah SKPD dari STT
<b>Jumlah</b>					<b>42.925.000,00</b>	

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang sebagian besar terpenuhi, bahkan mayoritas realisasi kinerja mencapai target.

Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang masih belum dapat dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang sudah diajukan akan tetapi, tidak di realisasi dan akan dijadikan Hutang Jatuh Tempo (Direalisasi pada Tahun Berikutnya).

Dengan belum tercapainya target pada kegiatan di atas tentunya berdampak pada capaian kinerja program.

Adapun langkah- langkah yang ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. Mengoptimalkan proses pelaksanaan perencanaan sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS
- d. Konsultasi, koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak dan mitra kerja



Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial dengan jumlah pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp.29.184.169.939,- Dan terealisasi sebesar Rp.27.096.569.289,- Atau 92,85.% dan realisasi Fisik sebesar 92,85 % yang terdiri dari: 7 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dari total pagu anggaran tersebut berasal dari dana DAU. Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				86,58	29.184.169.939	27.096.569.289	92,85
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	%	100	97,03	4.009.068.162	3.889.908.930	97,03
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	98,38	19.678.300	19.359.450	98,38
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	50	9.110.700	8.791.850	96,5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	55	10.567.600	10.567.600	100

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>99,39</b>	<b>3.678.917.212</b>	<b>3.656.292.703</b>	<b>99,39</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		100	2.890.561.412	2.875.662.583	<b>99,48</b>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25	75	788.355.800	780.630.120	<b>99,02</b>
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>91,11</b>	<b>11.878.700</b>	<b>10.822.700</b>	<b>91,11</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	60	11.878.700	10.822.700	<b>91,11</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>71,07</b>	<b>71.629.200</b>	<b>50.904.200</b>	<b>71,07</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	63,64	13.200.000	13.200.000	<b>100</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	100	9.400.200	9.378.200	<b>99,77</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	100	8.340.000	8.340.000	<b>100</b>

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	30	40.689.000	19.986.000	49,12
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan</b>	%	100	37,47	81.557.000	30.557.000	37,47
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	100	21.057.000	21.057.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	33,33	60.500.000	9.500.000	15,7
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Layanan</b>	%	100	98,89	53.134.600	52.546.890	98,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5115	47,13	8.797.000	8.797.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90,91	13.200.000	12.612.290	95,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	100	31.137.600	31.137.600	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	%	100	75,24	92.273.150	69.425.987	75,24

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	-	23.711.700	17.068.500	71,98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	60	68.561.450	52.357.487	76,37
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</b>	%	80	99,85	2.922.376.000	2.919.285.000	99,89
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial</b>	%	100	99,89	2.922.376.000	2.919.285.000	99,89
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	297	95,89	1.028.376.000	1.025.375.000,00	99,71

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	98,75	591.500.000	591.500.000,00	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	50	99,69	1.302.500.000	1.302.410.000,00	99,99
3	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak.</b>	%	80	61,15	20.880.000	10.214.600	48,92
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</b>	%	80	61,15	20.880.000	10.214.600	48,92
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	20	20.880.000	10.214.600	48,92

4	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>99,92</b>	<b>18.844.004.777</b>	<b>17.383.902.359</b>	<b>92,25</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase bantuan rehabilitasi sosial</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>92,69</b>	<b>9.033.311.400</b>	<b>8.372.591.400</b>	<b>92,69</b>
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	700	-	15.202.000	-	-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1680	100	163.109.400	163.109.400	100

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1900	95,4	8.605.000.000	8.209.482.000	95,4
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-	250.000.000	-	-
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>91,85</b>	<b>9.810.693.377</b>	<b>9.011.310.959</b>	<b>91,85</b>
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	95,18	8.744.825.000	8.323.286.000	95,18
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	74,44	180.829.600	134.611.200	74,44



	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	47,51	237.129.000	112.655.000	47,51
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	98,73	258.042.800	224.435.902	86,98
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	52	55,49	389.866.977	216.322.857	55,49
5	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.</b>	%	80	98,7	2.761.480.000	2.504.749.300	90,7
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengelolaan data fakir miskin</b>	%	100	90,7	2.761.480.000	2.504.749.300	90,7
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	100	99,68	50.000.000	49.842.100	99,68
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	20089	95,33	431.480.000	411.336.000	95,33

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	99,54	2.280.000.000	2.043.571.200	89,63
6	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.</b>	%	80	99,96	352.693.000	314.989.400	89,31
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial</b>	%	100	99,11	112.267.000	74.571.000	66,42
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	60	49.997.000	29.997.000	60
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	150	71,59	35.202.000	25.202.000	71,59
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	77,82	20.392.000	12.696.000	62,26
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	100	6.676.000	6.676.000	100

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	80	100	240.426.000	240.418.400	100
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	4	-	240.426.000	240.418.400	100
7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.</b>	%	80	49,45	273.668.000	73.519.700	26,86
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	%	100	50	273.668.000	73.519.700	26,86
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	-	273.668.000	73.519.700	26,86
<b>JUMLAH</b>					<b>86,58</b>	<b>29.184.169.939</b>	<b>27.096.569.289</b>	<b>92,85</b>

Dari tabel diatas dapat di uraikan beberapa hal terkait pencapaian program, kegiatan

dan sub kegiatan tahun 2022 . Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.4.009.068.162,- dan realisasi anggaran mencapai Rp.3.889.908.930,- atau sebesar 97,03 % dari target dengan capaian kinerja 97,03 % dengan realisasi fisik sebesar 97,03 % Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 ( Enam Belas ) sub kegiatan.

Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.2.922.376.000,- dan realisasi Rp.2.919.285.000,- atau sebesar 99,89 % dari target dengan capaian kinerja 79,88 % dengan realisasi fisik 99,89 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp. 20.880.000,- dan realisasi Rp. 10.214.600,- atau sebesar 48,92% dari target dengan capaian kinerja 61,15 % dengan realisasi fisik 48,92% Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar 18.844.004.777,- dan realisasi Rp. 17.383.902.359,- atau sebesar 92,25 % dari target dengan capaian kinerja 79,93 % dengan realisasi fisik 92,25 % Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 9 (sembilan ) sub kegiatan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.761.480.000,- dan realisasi Rp. 2.504.749.300,- atau sebesar 90,70 % dari target dengan capaian kineja 98,70 % dengan realisasi fisik 90,70 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 ( tiga ) sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 352.693.000,- dan realisasi Rp.314.989.400,- atau sebesar 89,31 % dari target dengan capaian kinerja 99,96 % dengan realisasi fisik 89,31 % Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan 4 (empat) sub Kegiatan. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Anggaran sebesar Rp. 273.668.000,- dan realisasi Rp.

73.519.700,-atau sebesar 26,86 % dengan capaian kinerja 90 % dengan realisasi fisik 90 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

## **2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut analisis kinerja Dinas Sosial terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Sosial Tahun 2022 dapat diketahui bahwa IKU Dinas Sosial yaitu:

### **“Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan”**

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan kerjasama yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dengan mengoptimalkan penanganan PMKS
2. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyedia fasilitas publik

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Sosial tahun 2023 tersebut maka kebijakan/ langkah-langkah yang perlu dilakukan tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Perencanaan pengendalian dengan segala prioritas berdasarkan kinerja;
2. Konsultasi, koordinas dan kerjasama dengan berbaagi pihak terasuk mitra;
3. Pengembangan kegiatan inovatif dan dengan dukungan pemenuhanstandar pelayanan minimal;

4. Komitmen pimpinan dan TAPD dalam penanganan PMKS dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS.

**Tabel 2.2**

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 (Sesuai SK IKU dan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target 2023
					Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Tujuan</b> : Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$	54	67	99,11	147,92	85
	<b>Sasaran</b> : Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang ada	129.440	106.791	105,841	99,11	109.461

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 sebesar 105,841 Jiwa kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 106.791 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 99,11 % akan tetapi capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 94,02%. Dengan target sampai tahun 2023 sebesar 109.461 Jiwa (85%) yang tertuang dalam renstra Dinas Sosial maka beberapa strategi yang telah dijelaskan sebelumnya akan dilaksanakan lebih lanjut.

Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki tanggungjawab untuk menangani 26 jenis PMKS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis PMKS
1.	Anak Balita Terlantar
2.	Anak terlantar
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4.	Anak Jalanan
5.	Anak dengan Kedisabilitas
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7.	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus
8.	Lanjut Usia Terlantar
9.	Penyandang Disabilitas
10.	Tuna Susila
11.	Gelandangan
12.	Pengemis
13.	Pemulung
14.	Kelompok Minoritas
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA
18.	Korban <i>Trafficking</i>
19.	Korban Tindak Kekerasan
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21.	Korban Bencana Alam
22.	Korban Bencana Sosial
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24.	Fakir Miskin (FM)
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Fisikologis
26.	Komunitas Adat Terpenci (KAT)

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain dengan adanya dukungan dana APBN dan APBD Propinsi serta giat setiap bidang pada Dinas Sosial dalam melaksanakan setiap program yang telah direncanakan. Selain faktor pendorong, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam upaya pencapaian target tersebut antara lain :

- a. Kualitas SDM masih rendah.
- b. Belum terintegrasinya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dengan adanya faktor-faktor tersebut Dinas Sosial melakukan inovasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM
- b. Mengembangkan sistem teknologi informasi penanganan PMKS dan pengembangan PSKS yang ada secara maksimal.

Selanjutnya, dengan sisa target penurunan PMKS sampai tahun 2023 sebesar 5% serta jumlah PMKS yang tertangani sebesar 120% maka, beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
- b. Meningkatkan penanganan PMKS
- c. Pembentukan satuan tugas pengelola data

Adapun perhitungan capaian indikator kerja dinas sosial dari tahun 2018 hingga tahun 2022 didasarkan pada data dukung tabel berikut ini.



**Tabel 2.3 Data Dukung dalam Penghitungan Capaian Indikator Kerja Dinas Sosial Tahun 2018-2023**

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani
1.	Anak Balita Terlantar	12	12	12	12	-	-	4	4	1	1
2.	Anak Terlantar	3.500	2.500	3500	2.376			5.192	2.780	9440	9440
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum(A BH)	66	20	66	20	4		44	44	55	55
4.	Anak Jalanan	-	-	20		10			2	-	-
5.	Anak dengan Kedisabilitas an (ADK)	-	-	171	75	23	23	357	36	72	32
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	-	-	100	-	-		7	7	6	6
7.	Anak yang Memerlukan	13	13	13	13	-		4	4	55	55

	Perlindungan Khusus										
8.	Lanjut Usia Terlantar	2108	20	2.108	20	1.900	770	4.227	571	5.058	5.058
9.	Penyandang Disabilitas	1567	187	1.567	187	1.691	315	1.691	132	1.091	661
10.	Tuna Susila	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gelandangan	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pengemis	-	-	10	-	4	-	-	-	15	15
13.	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
14.	Kelompok Minoritas	26	26	26	26	-	-	-	-	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	603	15	603	100	603	100	54	-	56	-
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)			37		49	-	109	-	109	-
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA			35		102	-	19	2	19	-
18.	Korban Traffcking					1	-	39	39	124	19
19.	Korban					3	-	51	51	41	-

	Tindak Kekerasan										
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)			46			-		-	78	-
21.	Korban Bencana Alam			85.262	6.000	589	-	2.162	2.162	593	593
22.	Korban Bencana Sosial			13		789	168		-	807	807
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	134	17	134	17		67	134	23	70	12
24.	Fakir Miskin (FM)	261.053	148.563	261.053	97.563	260.573	52.115	123.583	123.583	89.087	89.087
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Fisikologis	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>354.882</b>	<b>106.409</b>	<b>266.671</b>	<b>53.535</b>	<b>266.671</b>	<b>53.535</b>	<b>137.677</b>	<b>129.440</b>	<b>106.791</b>	<b>105.841</b>

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2023

## 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2022 sudah tergolong baik, termasuk dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan LKPJ yang semakin membaik, dimana realisasi dari target tersebut masih belum mencapai Target yang sudah di tentukan. Tingkat capaian kinerja yang membaik tersebut masih tergolong relatif kecil disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Timur terus meningkat jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Timur .

Ketercapaian dan ketidak tercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut antara lain :

- 1) Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kurang maksimal;
- 2) Kurang representatif ruangan kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur;
- 3) Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, dimana apabila Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Lombok Timur tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Lombok Timur, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
- c. Rendahnya alokasi anggaran yang di bebaskan oleh APBD dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di Kabupaten Lombok Timur.
- d. Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) yang diharapkan dengan adanya sarana

tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan atau meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kabupaten Lombok Timur dan Sistem Rujukan Layanan Terpadu sebagai sarana mempermudah warga miskin untuk mempermudah aksesibilitas Fakir Miskin. Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan PMKS seperti Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis. Penanganan PMKS tersebut perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir permasalahan tersebut.

### **2.3 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 bahwa Dinas Sosial ) Kabupaten Lombok Timur bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lombok Timur, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp. 25.285.684.961,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial).

Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD. Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023, maka kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2022**

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					<b>29.184.169.939</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program			100%	4.009.068.162
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan			100%	19.678.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kantor Dinas Sosial	Jumlah dokumen	20 Dokumen	9.110.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	10.567.600
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana</b>			<b>100%</b>	<b>3.678.917.212</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kantor Dinas Sosial	Jumlah ASN	1 Tahun	2.890.561.412
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Jasa	12 Bulan	788.355.800
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah</b>			<b>100%</b>	<b>11.878.700</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kantor Dinas Sosial	Jumlah dokumen	20 Dokumen	11.878.700
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</b>			<b>100%</b>	<b>71.629.200</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kantor Dinas Sosial	Jumlah komponen listrik	11 Jenis	13.200.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Lombok Timur	Jumlah cetakan dan pengadaan	9000 Lembar	9.400.200

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Kantor Dinas Sosial	Jumlah bacaan	900 Ekspl	8.340.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	10 Kali	40.689.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan</b>			<b>100%</b>	<b>81.557.000</b>
Pengadaan Mebel		Kab. Lombok Timur	Jumlah Mebel	1 Paket	21.057.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Lombok Timur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	60.500.000
<b>Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Layanan</b>			<b>100%</b>	<b>53.134.600</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lombok Timur	Jumlah Surat Keluar	1500 Eksplr	8.797.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Lombok Timur	Jumlah tagihan terbayar	11 Unit	13.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kantor Dinas Sosial	Jumlah jasa	12 Bulan	31.137.600
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Layanan</b>			<b>100%</b>	<b>92.237.150</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Lombok Timur	jumlah kendaraan	1 Unit	23.711.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Lombok Timur	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	15 Unit	68.561.450
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</b>			<b>80%</b>	<b>2.922.376.000</b>
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>			<b>100%</b>	<b>2.922.376.000</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah pendamping PKH yang mendapat bantuan	80%	1.028.376.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Terbinanya lembaga kesejahteraan sosial	80%	591.500.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pelayanan	80%	1.302.500.000
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Penurunan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>			<b>80%</b>	<b>20.880.000</b>



<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</b>			<b>80%</b>	<b>20.880.000</b>
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Kab. Lombok Timur	Jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	20%	20.880.000
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.</b>			<b>80%</b>	<b>18.844.004.777</b>
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase bantuan rehabilitasi sosial</b>			<b>100%</b>	<b>9.033.311.400</b>
Penyediaan Sandang		Kab. Lombok Timur	Jumlah Sandang		15.202.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Kab. Lombok Timur	Jumlah Bimbingan Sosial	100%	163.109.400
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Kab. Lombok Timur	Jumlah Akses Layanan	100%	8.605.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Layanan Kedaruratan	100%	250.000.000
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar.</b>			<b>100%</b>	<b>9.810.693.377</b>
Penyediaan Sandang		Kab. Lombok Timur	Jumlah Sandang	100%	8.744.825.000
Penyediaan Alat Bantu		Kab. Lombok Timur	Jumlah Alat Bantu	100%	180.829.600
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Kab. Lombok Timur	Jumlah Bimbingan	100%	237.129.000
Pemberian Layanan Rujukan		Kab. Lombok Timur	Tersedianya Data Keluarga Miskin	80%	258.042.800
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Kerjasama	100%	389.866.977
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.</b>			<b>80%</b>	<b>2.761.480.000</b>

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Sosial Tepat Sasaran			100%	2.761.480.000
	Persentase Pengelolaan data Fakir Miskin				
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah yang Terdata	100%	50.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Data yang Dikelola	100%	431.480.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab. Lombok Timur	Bantuan Sosial Tepat Sasaran	80%	2.280.000.000
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.</b>			<b>80%</b>	<b>352.693.000</b>
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial</b>			<b>100%</b>	<b>112.267.000</b>
Penyediaan Makanan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Makanan	100%	49.997.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Kab. Lombok Timur	Jumlah Tempat Penampungan	100%	35.202.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Kab. Lombok Timur	Terpenuhinya Kebutuhan Pasca Bencana	80%	20.392.000
Pelayanan Dukungan Psikososial		Kab. Lombok Timur	Jumlah Layanan Dukungan	100%	6.676.000
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana Yang mendapatkan Perlindungan Sosial</b>			<b>100%</b>	<b>240.426.000</b>
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Kab. Lombok Timur	Jumlah Koordinasi	100%	240.426.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.</b>			<b>80%</b>	<b>273.668.000</b>
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.</b>			<b>2 Unit</b>	<b>273.668.000</b>
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Dinas Sosial	TMP yang Tertata Indah	1 Unit	273.668.000
<b>JUMLAH</b>					<b>29.184.169.939</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangan masalah kesejahteraan sosial;
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari

terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya;

- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a) Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c) Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d) Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur**

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Lombok Timur bertanggungjawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lombok Timur bertujuan :

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b) Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e) Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada tujuan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Lombok Timur. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran dan Indikator Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target 2023
					Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$	54	67	99,11	147,92	85
	<b>Sasaran :</b> Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang ada	129.440	106.791	105,841	99,11	109.461

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2023 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Lombok Timur pada Tahun 2023.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Lombok Timur. Adapun program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 sesuai Permendagri No. 050-5889 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

##### **2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 5). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 9). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 10). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 12). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 13). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

### **1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah**

#### **Kabupaten/Kota**

- 14). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 15). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 16). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

## **III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK**

### **KEKERASAN**

- 1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**

(17). Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

#### **IV.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

##### **1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

18). Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

19). Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

20). Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

21). Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

22). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

23). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

24). Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

25). Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

26). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

27). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

28). Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

##### **2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

##### **Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

30). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

31). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

32). Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

## **V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

### **1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

33). Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

34). Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

35). Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

36). Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

## **VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

### **1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

37). Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

38). Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

39). Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

40). Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

41). Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

### **2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**

42). Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

## **VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

### **1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**

43). Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sebagai penjabaran kebijakan-kebijakan umum pembangunan Bidang Sosial, maka Dinas Sosial telah menetapkan program-program kegiatan yang mungkin dilaksanakan dalam Tahun 2023 baik sumber dana dari APBD Kabupaten dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU ANGGARAN	KET.
	CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
		2023		2023		2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							12.456.135.147	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	100%					3.838.135.147	
Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	100%	48.972.300	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen			30.824.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan			18.147.600	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100%	3.546.627.648	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			2.732.572.348	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan			814.055.300	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>15.478.700</b>	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Dokumen			15.478.700	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.628.200</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Jenis			13.200.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9000 Lembar			9.400.200	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	900 Ekspl			8.340.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali			28.688.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Persentase Capaian Layanan</b>	<b>100%</b>	<b>66.934.600</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Eksplr			12.397.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Unit			30.600.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan			23.937.600	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100.493.699</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			26.620.625	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit			73.873.074	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	80%					1.633.000.000	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Persentase Penyelenggaraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>1.633.000.000</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80%			898.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80%			555.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80%			180.000.000	
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Penurunan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>80%</b>					<b>3.500.000</b>	
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>					<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</b>	<b>80%</b>	<b>3.500.000</b>	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20%			3.500.000	

<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.</b>	<b>80%</b>					<b>6.666.500.000</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					<b>Persentase bantuan rehabilitasi sosial</b>	<b>100%</b>	<b>6.651.500.000</b>	
Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang			2.000.000	
Penyediaan Sandang			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang			1.000.000	
Penyediaan Alat Bantu			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang			10.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang			1.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang			30.500.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang			1.000.000	



Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			1.000.000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1318 Orang			1.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang			6.501.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			101.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			1.000.000	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>					<b>Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar.</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang			5.000.000	
Pemberian Layanan Rujukan			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang			1.000.000	

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100 Dokumen			10.000.000	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.</b>	<b>80%</b>					<b>211.000.000</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Persentase Pengelolaan data Fakir Miskin</b>	<b>100%</b>	<b>211.000.000</b>	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	100%			25.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100%			146.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80%			20.000.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang			20.000.000	
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.</b>	<b>80%</b>					<b>89.000.000</b>	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					<b>Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	
Penyediaan Makanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			3.087.500	
Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			3.054.600	

Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			2.830.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80%			1.890.500	
Pelayanan Dukungan Psikososial			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			4.137.400	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>					<b>Persentase Korban Bencana Yang mendapatkan Perlindungan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			74.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.</b>	<b>80%</b>					<b>15.000.000</b>	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>					<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.</b>	<b>2 Unit</b>	<b>15.000.000</b>	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Unit			15.000.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>12.456.135.147</b>	

## **4.2 Analisis Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari

6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang harus mencakup Materi muatan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumberdaya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur di Bidang Sosial guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada.

Renja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman operasional dinas yang memuat visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Selong, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**H. SUROTO, SKM., M. Kes**  
**NIP : 19660723 198803 1007**